

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan

Siti Fatimah*)

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

sitifatimah93157@gmail.com

Diana Rizky

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

lubisdianariski@gmail.com

Neni Angriani

STAIN Mandailing Natal, Indonesia

neniangriani24@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The implementation of Civic Education (PKn) learning which is carried out from elementary school to higher education still requires improvement efforts until now, because the character problems of the younger generation are getting more complex, input from the results of the analysis is needed to provide solutions to these problems. The purpose of writing this article is to analyze the dynamics of the implementation of PKn learning at the age of our beloved country which is 75 years old. The method used in this article is a literature study, by analyzing studies on civic education and then drawing conclusions. The results of this article are that efforts to improve the quality of PKn learning still need to be studied. One of the recommendations for improvement is first, to provide role models for students, both role models at school by teachers and role models by parents in the family environment. Second, increase teacher creativity in learning starting from learning innovation by implementing various learning models, methods and media. Third, improve institutions, both teacher organizations such as the Subject Teacher Conference (MGMP) and associations from universities.*

Keyword: *Dynamics, Independence, Civic Education, Reflection of Independence.*

Abstrak: Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan tinggi masih diperlukan upaya perbaikan hingga saat ini, karena permasalahan karakter pada generasi muda semakin lama justru semakin kompleks, diperlukan masukan dari hasil analisis untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dinamika pelaksanaan pembelajaran PKn di usia negara kita tercinta yang ke 75 tahun. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka, dengan cara menganalisis kajian tentang pendidikan kewarganegaraan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari artikel ini adalah bahwa upaya perbaikan kualitas pembelajaran PKn masih sangat perlu untuk dilakukan kajian. Salah satu rekomendasi perbaikan adalah *pertama*, memberikan keteladanan pada siswa baik keteladanan di sekolah oleh guru maupun keteladanan oleh orang tua di lingkungan keluarga. *Kedua*, meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran mulai dari inovasi pembelajaran dengan menerapkan model, metode dan media pembelajaran yang bervariasi. *Ketiga*,

meningkatkan kelembagaan baik organisasi guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun asosiasi dari perguruan tinggi.

Kata Kunci: Dinamika, Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan, Refleksi Kemerdekaan.

Pendahuluan

Indonesia memasuki usia ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 ini. Pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan tidak seperti biasanya karena Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19, sehingga tidak meriah seperti pada tahun-tahun sebelumnya, karena diwajibkan untuk physical distancing untuk menghindari penyebaran virus corona. Akan tetapi permasalahan yang akan dibahas bukan tentang virus corona melainkan usia bangsa Indonesia sudah menginjak angka 75 tahun, pada orang dewasa usia ini adalah usia yang sudah tua renta, yang seharusnya sudah bahagia menikmati usia senja. Akan tetapi negara Indonesia tampaknya masih harus berjuang bersama untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat (Sukmana, 2016). Dimana negara memodifikasi dampak pasar, dengan memberikan semacam jaminan minimum (mengurangi kemiskinan); mencakup berbagai risiko sosial (keamanan), dan menyediakan layanan tertentu (perawatan kesehatan, perawatan anak dan orang tua, dengan standar yang baik (Andersen, 2012).

Cita-cita nasional di dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa”, menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut tujuan negara dalam arti luas atau sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) bukan sebagai negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*) (Ridlwani, 2014). Pembangunan nasional dari berbagai bidang seharusnya mengacu pada tujuan negara dalam arti *welfare state*, mengacu pada Pancasila dan juga UUD 1945 termasuk pada bidang pendidikan dalam proses penentuan kebijakan maupun pada proses transfer pengetahuan. Pendidikan adalah urusan negara karena pendidikan sangat penting untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kebebasan rakyat, serta menunjukkan bahwa negara itu ada di tengah-tengah warga negara (Aulia & Arpanudin, 2019).

Pelaksanaan pendidikan tentu saja tidak hanya mengedepankan teori semata melainkan penanaman karakter bangsa yang telah diatur di dalam undang-undang negara Indonesia. Pendidikan sebagai cara umat manusia sepanjang kehidupannya untuk transmisi dan transformasi baik nilai maupun ilmu pengetahuan (Sudrajat, 2011). Hal ini dilakukan guna memberikan arah terhadap pelaksanaan dan

perkembangan pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang (Sujana, 2019). Pendidikan karakter di Indonesia dilakukan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, yaitu melalui pendidikan Agama, pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan karakter penting bagi kehidupan manusia, maka peran yang dimainkan dunia pendidikan haruslah tidak sekedar menunjukkan pengetahuan moral, tetapi juga mencintai dan mau melakukan tindakan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter bisa dilakukan dengan berbagai metode yaitu penanaman nilai, keteladanan nilai, fasilitasi nilai, dan keterampilan nilai (Kirschenbaum, 1995). Keteladanan menjadi aspek yang penting untuk membina karakter peserta didik. Hal tersebut disebabkan oleh keteladanan yang mementingkan perilaku secara nyata yang bisa dijadikan acuan oleh peserta didik. Widyaningsih et al. (2014) menyatakan bahwa dalam strategi pembinaan karakter menjadi bagian dari pendekatan komprehensif yang merupakan sintesis dari dua metode tradisional yaitu metode penanaman nilai keteladanan dan metode kontemporer melalui *life skill*. Menurut Lickona (2009) pendidikan karakter mempunyai tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Di dalam pendidikan karakter tidak hanya tentang benar dan salah tetapi juga menanamkan suatu kebiasaan yang baik dengan harapan peserta didik paham dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pendidikan karakter telah dilaksanakan di Indonesia sejak anak usia dini hingga di pendidikan tinggi, akan tetapi permasalahan kebangsaan justru semakin kompleks. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Permasalahan kebangsaan yang dialami negara kita diantaranya krisis karakter. Krisis hidup (krisis karakter) tidak hanya semata-mata krisis intelektual dan moral, namun sedikit lebih dalam ke jantung persoalan bahwa krisis moral yang hampir merambah seluruh lini kehidupan kita, sebenarnya berasal dan bermuara pada krisis spiritual (Belferik, 2013).

Permasalahan karakter yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah maraknya tawuran pelajar, rendahnya kejujuran, kurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin, meningkatnya kelompok teman sebaya yang kejam dan bengis, kejahatan, perampokan, berbahasa yang tidak sopan, merosotnya etika dan etos kerja, sikap individualis, perilaku menyimpang, ketidaktahuan sopan santun (Sujana, 2019). Degradasi moral ditandai dengan mudarnya sikap sopan santun, jiwa kebhinekaan, gotong royong, serta makin maraknya sikap anarkisme di kalangan peserta didik mulai dari pelajar sampai mahasiswa. Di sisi lain makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional baik di instansi pemerintah maupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara ini telah terjadi degradasi moral, akhlak, serta karakter yang seharusnya ditunjukkan sebagai budaya

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pentingnya nilai moral tersebut diperkuat oleh pernyataan Aristoteles dalam Dahlbeck (2018) tentang nilai-nilai yang menyatakan bahwa “Aristoteles menafsirkan nilai-nilai etis sebagai kondisi perantara yang menyeimbangkan antara kekurangan dan kelebihan. Seni menjalani kehidupan yang seimbang dijaga oleh keinginan untuk berjuang untuk bertindak berdasarkan kebijakan yang ditempatkan di antara dua kutub ekstrem, yang keduanya sama-sama tidak diinginkan”

Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan membutuhkan pembentukan karakter dan moral serta mendidik tanggung jawab sipil (warga negara) dan menghormati orang lain (Althof & Berkowitz, 2006). Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter seringkali memiliki ciri yang terkait dengan masalah moral, muncul dari persepsi krisis (dan memanfaatkan persepsi itu untuk mendapatkan pijakan kurikuler), bagus dalam teori dan retorika, namun rendah dalam praktik (Davies et al., 2005). Permasalahan pembelajaran PKn di lapangan dari hasil penuturan para guru PKN khususnya di Jawa Tengah pada kegiatan Sarasehan 75 Tahun Indonesia Merdeka yang dilaksanakan pada Hari Selasa 18 Agustus 2020 yang diselenggarakan secara daring melalui zoom oleh

Dalam pembelajaran PKN mengalami banyak tantangan, sehingga pelaksanaan pembelajaran PKN yang tujuan utamanya menanamkan nilai moral menjadi tidak efektif. Permasalahan yang terjadi diantaranya guru PKN yang masih disibukan dengan persoalan administratif, dituntut untuk memiliki jam mengajar sebanyak 40 jam dalam satu minggu, guru PKN tidak dilibatkan ketika terjadi persoalan kenalan siswa, PKN masih dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak penting, pelaksanaan pembelajaran PKN yang masih konvensional sehingga pembelajaran tidak menarik. Dari permasalahan inilah perlu dicarikan solusi agar pelaksanaan pembelajaran karakter di Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun lamanya berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang memusatkan perhatian dan kajian pada pelaksanaan isu-isu pembelajaran PKN sebagai refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka. Kajian pustaka diambil dari artikel jurnal dan juga buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran PKN, pentingnya pendidikan moral, pentingnya pendidikan karakter, untuk memberikan masukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran PKN di Indonesia. Dari berbagai artikel jurnal dan buku kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas. Dalam rangka membahas permasalahan diatas, penulis melakukan penelusuran pustaka yang akan akan dibahas dalam

beberapa sub bahasan, diantaranya kerisauan yang dialami oleh guru PKN khususnya Sumatra utara daerah Mandailing natal, pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, pentingnya peran organisasi seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Asosiasi perguruan tinggi khususnya PKN untuk ikut serta mencari solusi dari permasalahan kebangsaan yang terjadi di Indonesia. Dari hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Manusia baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat hidup dalam ruang sosial dan menciptakan kebudayaan, membina, mengembangkan, dan melestarikannya, serta hidup dalam warna atau corak kebudayaannya sendiri. Semenjak manusia diciptakan maka semenjak itu pula pendidikan telah dilaksanakan, artinya usia pendidikan sama dengan usia manusia. Dalam proses pendidikan dan proses pewarisannya juga telah mengedepankan etika atau moral yang berlaku dan berlangsung di masanya, dimana akan selalu melakukan perbuatan baik dengan mengadaptasi lingkungan dan budaya yang ada di lingkungannya. Untuk itu diperlukan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk *survive* bagi generasi berikutnya. Dalam konteks abad 21, pendidikan harus mampu mengembangkan manusia yang memiliki keterampilan untuk sukses di dunia saat ini, seperti pemikiran kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi (Partnership for 21st Century Learning, 2015). Namun demikian, tujuan pendidikan tidak hanya sukses di dunia, namun juga harus mampu menumbuhkan kecerdasan hati yang menuntun manusia kembali pada penciptanya dengan keimanan dan ketakwaan sebagaimana tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

Bergulirnya waktu pendidikan telah mengalami evolusi dari yang paling sederhana menjadi yang lebih kompleks, sehingga dalam prosesnya pun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan. Etika dalam proses mencapai tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena hal ini terkait hasil akhirnya dimana proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri sehingga kemampuan, bakat, kecakapan dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Proses ini dapat dilihat dari awal proses pendidikan di dalam keluarga, orang tua memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dilingkungannya dengan cara suri teladan, yaitu memberikan contoh tentang sopan santun sesuai etika yang baik juga pendidikan agama kepada anak-anaknya sehingga mereka tahu dan terampil hidup di tengah masyarakat dengan etika dan moral hidup yang baik. Demikian juga anak-anak akan menjadi dewasa dan akan mewariskan ke generasi berikutnya dari yang pernah dipelajari dan dialaminya dari kecil dan seterusnya. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi

kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Pendidikan itu berlangsung dengan baik dan berhasil, jika seorang pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan etika dan moral yang baik.

Manusia memiliki cara hidup yang penuh dengan nilai-nilai baik dan luhur dalam kehidupannya, sedangkan tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik perlu adanya kepastian dan jaminan hukum terutama dalam pendidikan formal, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan atau hukum yang melindungi peserta didik, proses pendidikan dalam mencapai tujuan. Dalam proses pengembangan potensi manusia, maka seyogianya dirumuskan atau direncanakan suatu pendidikan yang mampu memberikan wadah dalam mengupayakan pengembangan potensi setiap individu yang beraneka ragam.

Pendidikan merupakan pewarisan nilai-nilai dalam peradaban manusia. Artinya pendidikan tidak akan terlepas dari pewarisan budaya dalam satu masyarakat. Adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai dan tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa adanya masyarakat, sebaliknya tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan (Supriyoko, 2003). Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, perkembangan terkini kecenderungan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengikuti dominasi paradigma *scientific* yang dimaknai secara sempit sebagaimana yang dianut paradigma positivism dengan ciri penekanan pada hal-hal yang *observable*, *measurable*, *standardized*, yang tentu saja dengan asumsi satu cocok untuk semua (*one size fits all*). Pembelajaran demokrasi yang merupakan salah satu elemen penting dari pendidikan kewarganegaraan menjadi “kering” dan terjebak pada hal-hal yang sifatnya *artificial*, *procedural*, bukan *essential*. Fenomena mengemukanya wacana *best practice* merupakan salah satu penandapendidikan kewarganegaraan yang sejatinya bersifat *political* dan *contextual* ikut terjebak pada logika yang sangat naif.

Guru PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa sebagai warga negara, nilai-nilai budaya bangsa, serta implikasinya pada ketahanan nasional. Agar proses transfer pengetahuan dapat berjalan dengan baik, maka guru PKn juga harus memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan keteladanan oleh siswa, diantaranya Jujur, memiliki komitmen, memiliki kompeten, kerja keras, konsisten pada mata pelajaran agar memiliki konsentrasi kajian yang mendalam. Sedangkan peran guru PKn adalah *pertama*, sebagai pemegang amanah dalam menjalankan tugas mengajar, membimbing, dan sekaligus mendidik siswa dengan penuh tanggungjawab. *Kedua*, guru PKn memiliki peran untuk memberikan keteladanan baik dalam ucapan, sikap, yang melekat pada guru. *Ketiga*, mendidik dengan hati dan membangun motivasi (Suyato et al., 2016). Maka sebelum

mengajarkan pada peserta didik guru PKn harus sudah melaksanakan peran tersebut diatas.

Dalam bidang pendidikan kewarganegaraan termasuk pendidikan moral di dalamnya, Veugelers (2011) mengidentifikasi beberapa isu yang relevan dengan praktik pedagogis yang ditujukan untuk menciptakan warga negara demokratis yang kritis. Isu itu antara lain meliputi: 1) tata cara seperti komunikasi nilai, di mana para siswa belajar untuk berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan nilai-nilai. Pertimbangan nilai tentu saja membutuhkan kriteria untuk menelaah perilaku, seperti nilai keadilan (Power et al., 1992), 2) nilai-nilai yang mendorong perilaku, komponen afektif dari perkembangan moral perlu mendapatkan perhatian. Kepedulian, keterlibatan dan partisipasi adalah komponen penting dari domain sosial; 3) untuk menemukan di mana nilai-nilai moral itu penting, perkembangan sensitivitas moral, dan kemampuan untuk mengelola emosi itu penting, dan 4) beberapa pendekatan pendidikan moral terkini di dalam bidang kependidikan ditandai dengan pendekatan terintegrasi untuk pencapaian keterampilan komunikasi nilai, stimulasi nilai tertentu yang sering diorientasikan untuk kewarganegaraan demokratis kritis, dan perhatian terhadap sekolah sebagai komunitas

Pelaksanaan pembelajaran PKn ternyata bukan tanpa hambatan. Berdasarkan data, tantangan yang dihadapi oleh guru PKn ternyata sangat kompleks, sehingga berakibat pada tidak efektifnya proses transfer pengetahuan kepada siswa, yang terjadi pada akhirnya adalah tujuan pembelajaran PKn belum tercapai secara optimal. Penuturan para Guru PKn di Jawa Tengah khususnya pada acara sarasehan 75 tahun Indonesia Merdeka permasalahan yang dihadapi guru masih sangat kompleks seperti yang sudah disampaikan di atas. Kendala yang dihadapi guru PKn diantaranya adalah kualitas guru yang masih rendah, kurikulum yang selalu berubah dan jam belajar sangat kurang, fasilitas masih sangat kurang, dan kesejahteraan Guru PKn yang masih rendah (Bego et al., 2016).

Penelitian lain menyatakan, permasalahan dalam pembelajaran PKn diantaranya mereka dihadapkan pada kondisi sekolah dengan keterbatasan sumber daya manusia (jumlah guru yang minim), sarana prasarana (Ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, buku paket), kultural (kebiasaan, mindset) yang belum kondusif untuk pengembangan karakteristik warga negara yang baik, dan juga hambatan dari masyarakat (Suyato et al., 2016). Salah satu tantangan lain yang sekarang dihadapi oleh Guru PKN di tahun 2020 adalah adanya pandemi virus Corona/Covid 19 yang berdampak luas bukan hanya pada bidang pendidikan aja melainkan dalam berbagai kehidupan. Permasalahan lain yang ditemukan dari studi dokumentasi, masalah yang dihadapi guru PKN diantaranya guru kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran, guru belum melibatkan siswa dalam menggunakan alat peraga, guru kesulitan dalam mengondisikan kelas, guru kurang memotivasi siswa (Perwitasari, 2014).

Permasalahan tersebut di atas perlu dipecahkan bersama, salah satunya dengan melihat peluang yang dimiliki oleh guru PKN, diantaranya adalah memberikan

keteladanan, meningkatkan kreativitas guru, meningkatkan kelembagaan baik organisasi guru seperti MGMP, asosiasi dari perguruan tinggi. guru didorong untuk paham mengenai hak-hak politik dan sosial serta berlatih menanamkan hak sipil tersebut. Tetapi yang menjadi permasalahannya bahwa sedikit kesempatan guru untuk benar-benar mempraktikkannya di masyarakat hal itu dikarenakan keterbatasan waktu dan cakupan isu yang luas untuk dibahas (Sigauke, 2013)

Pertama, Memberikan keteladanan baik sikap, perilaku sebagai pendidik. Konsep keteladanan merupakan proses pendidikan yang berlangsung dengan membiasakan, memberi contoh perilaku atau sosok atau figur dalam bertingkah laku, berbicara, berfikir dan melakukan aktivitas tertentu untuk membentuk kebiasaan yang baik sehingga akan membentuk karakter yang baik pula (Budiyo & Harmawati, 2017). Keteladanan dalam pendidikan merupakan sebuah upaya untuk menanamkan pendidikan karakter. Melalui keteladanan yang dimiliki oleh guru, sangat memungkinkan menjadi contoh untuk siswa baik dalam berbicara, bersikap dan berfikir. Keteladanan dibutuhkan oleh manusia timbul dari hati nurani dalam diri manusia untuk meniru (*taqlid*), hasrat tersebut mendorong manusia untuk meniru figur yang lebih dewasa (Rachman & Hijran, 2017). Selain guru yang seharusnya juga memberi contoh untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter adalah orang tua di keluarga, tokoh masyarakat, aparatur negara, politikus dan juga para petinggi negara. Seorang anak atau siswa pada umumnya akan meniru seseorang menjadi idola seperti guru ketika di sekolah, orang tua ketika di rumah, hingga di masyarakat dan di negara. Keteladanan yang bisa dilakukan oleh orang tua diantaranya dalam pendidikan akhlak meliputi: menasihati dengan lemah lembut, memberi contoh, menanamkan kedisiplinan melakukan ibadah, membiasakan berdoa. Keteladanan guru di sekolah diantaranya membiasakan senyum, salam, sapa, sopan, santun, bersikap sabar, tidak gampang marah, rajin melaksanakan perintah agama (Saripah, 2016).

Pendekatan pendidikan kewarganegaraan harus bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi semata ke arah yang lebih menekankan pada proses. Pendekatan yang bersifat desentralisasi atau otonomi pendidikan baik untuk tingkat daerah, individual sekolah maupun individu guru sudah seharusnya dilaksanakan, dalam semua mata pelajaran dan secara khusus dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan perubahan terutama menyangkut bidang materi pengajaran, metodologi dan penilaian hasil belajarnya. Langkah nyata lainnya adalah menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan warga negara mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya yang diwujudkan dalam interaksi edukatif di dalam kelas dengan suasana dialogis yang konstruktif (Wahab, 1996).

Kedua, meningkatkan kreativitas guru diantaranya dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model, metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Di era sekarang yang mana manusia tidak bisa lepas dari teknologi mengharuskan pembelajaran harus inovatif, tidak monoton, pembelajaran dari dua arah khususnya dalam pembelajaran karakter melalui PKN, agar tujuan pembelajaran

tercapai dengan optimal. Maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (powerful learning area) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri: pembelajaran menjadi lebih bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan mengaktifkan (*activating*) (Haryati & Rochman, 2012). Apalagi di tahun 2020 ini yang mana proses pembelajaran dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pembelajaran PKN dilaksanakan pada saat pandemi. Guru dituntut untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, sehingga proses penanaman karakter dapat dilaksanakan dengan baik. Domain kognitif masih menjadi dominasi pembelajaran. Sebagai contoh, ketika guru lebih menunjukkan pemahaman mengenai sejarah HAM yang ada di benak mereka lebih pada perang dunia II padahal harusnya pembelajaran HAM dalam kurikulum ini lebih kepada nilai-nilai dan masalah hak sipil yang harus dijadikan reflektif

Ketiga, sinergi kelembagaan antara organisasi guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), asosiasi dari perguruan tinggi. Pentingnya sinergi kelembagaan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi Guru PKN. Dengan pertemuan antara guru PKN dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat saling bertukar pikiran, pandangan tentang hal-hal/isu-isu baru tentang kebangsaan. Dengan penguatan organisasi juga dapat secara bersama-sama untuk ikut memberikan saran atas kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan. Melalui organisasi juga dapat memberikan usulan, saran agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh guru. Selain melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) guru PKN juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui asosiasi. Contohnya Asosiasi Pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI) baik di tingkat Jawa tengah maupun di tingkat Nasional. Dengan sinergi, kerja sama, antara asosiasi dan MGMP dapat memperkuat keilmuan, kelembagaan, untuk para pendidik PKN.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran PKN masih diperlukan perbaikan. Masukan yang bisa diberikan adalah memberikan keteladanan baik sikap, perilaku sebagai pendidik. meningkatkan kreativitas guru diantaranya dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model, metode dan media pembelajaran yang bervariasi. sinergi kelembagaan antara organisasi guru seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), asosiasi dari perguruan tinggi. Pentingnya sinergi kelembagaan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi Guru PKN.

Referensi

- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518. <https://doi.org/10.1080/03057240601012204>
- Andersen, J. G. (2012). *Welfare states and welfare state theory* (Issue February).
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>
- Bego, K. C., Studi, P., Sejarah, P., & Flores, U. (2016). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah terjadinya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 7.
- Budiyono, & Harmawati, Y. (2017). Penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai keteladanan guru dan orang tua pada siswa sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional PPKn III*, 1–10.
- Dahlbeck, J. (2018). *Becoming virtuous: Character education and the problem of free will*. Malmö University.
- Davies, I., Gorard, S., & McGuinn, N. (2005). Citizenship education and character education: similarities and contrasts. *British Journal of Educational Studies*, 53(3), 341–358. <http://www.jstor.org/stable/3699247>
- Haryati, T., & Rochman, N. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Ilmiah Civis*, 2(2), 1–11.
- Kirschenbaum, H. (1995). *100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings*. Allyn & Bacon.
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Manullang, B. (2013). Grand desain pendidikan karakter generasi emas 2045. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.21831/jpk.voi1.i283>
- Partnership for 21st Century Learning. (2015). P21 partnership for 21st century learning. In *Partnership for 21st Century Learning*.
- Perwitasari, Z. A. (2014). Peningkatan kualitas pembelajaran melalui model time token arends dengan media audio visual. *Joyful Learning Journal*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/jlj.v3i1.5894>
- Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1992). *Lawrence Kohlberg's approach to moral education*. Columbia Univesity Press.
- Rachman, F., & Hijran, M. (2017). Kajian keteladanan dalam memperkuat pendidikan Indonesia. *The 5th University Research Colloquium: Cinta Negeriku, February*, 998–1003.

- Ridlwani, Z. (2014). Negara hukum Indonesia kebalikan nachtwachterstaat. *Fiat Justisia*, 5(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n02.56>
- Saripah, I. (2016). Peran orang tua dan keteladanan guru dalam peningkatan mutu pendidikan akhlak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(2), 19–32.
- Sigauke, A. T. (2013). Citizenship education in the social science subjects: An analysis of the teacher education curriculum for secondary schools. *Australian Journal of Teacher Education*, 38(11), 125–139. <https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n11.1>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/jpk.vi1i1.1316>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1), 102–
- Supriyoko, K. (2003). Sistem pendidikan nasional dan peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*.
- Suyato, S., Mardiono, M., Mulyono, B., & Arpanudin, I. (2016). Upaya pembentukan warga negara yang baik dan tantangan yang dihadapi oleh para guru PKn peserta SM3T 2015. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 137–150. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12737>
- Veugelers, W. (2011). A humanist perspective on moral development and citizenship education. In W. Veugelers (Ed.), *Education and humanism. Linking autonomy and humanity* (pp. 9–34). Sense Publishers.
- Wahab, A. A. (1996). *Politik pendidikan dan pendidikan politik: Model pendidikan kewarganegaraan Indonesia menuju warga negara global*. IKIP Bandung.
- Widyaningsih, T. S., Zamroni, & Zuchdi, D. (2014). Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai karakter pada siswa SMP dalam perspektif fenomenologis.